

EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI BAGI SISWA PADA PELANGGARAN TATA TERTIB DI SMP 2 KAPUAS TIMUR KABUPATEN KAPUAS

Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, Agusnadi
Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Pendidikan hendaknya berpedoman pada prinsip hukuman agar tidak lagi berbuat kesalahan, maka akan didapatkan dua macam titik pandang., baik berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen dalam penerapan tata tertib sekolah yang disertai hukuman atau sanksi dibutuhkan sebagai usaha dalam membuat siswa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan yang pada akhirnya dapat dirasakan pengaruhnya bagi siswa dalam membentuk keperibadian yang bermoral dan berdisiplin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan berfikir dengan suatu teori, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pemilihan pendekatan dan metode sangat diperlukan dalam penelitian, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memberikan pengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek keperibadian manusia. Pada intinya pendidikan mengarah pada memanusiakan manusia dalam upaya menumbuhkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Kata lain Pendidikan sebagai kebutuhan manusia dalam proses berfikir, bersikap, bertindak, maupun berperilaku. Proses pendidikan ditunjukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia secara utuh dan menyeluruh. Tujuan pendidikan merupakan sasaran inti dalam proses pendidikan dan mengarahkan pada perbuatan pendidikan.

Rumusan tujuan pendidikan harus jelas dan tepat agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 dikemukakan Tentang tujuan pendidikan Nasional, bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan tersebut, maka sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk membina keperibadian anak didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Djahiri (1985:4) yang menyatakan bahwa: Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan tempat belajar di mana anak akan berusaha membina, mengembangkan dan menyempurnakan potensi dirinya serta dunia kehidupan dan masa depannya. Sekolah merupakan salah satu tempat mempersiapkan generasi muda menjadi manusia yang dewasa dan berbudaya. Uraian di atas dapat diartikan bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berupaya membina,

mengembangkan dan menyempurnakan segenap potensi yang ada pada diri anak menuju proses pendewasaannya. Upaya mencapai tingkat kedewasaan yang optimal bagi anak didik, maka

sekolah berusaha mewujudkannya dengan jelas melaksanakan program-program pengajaran.

Program-program pengajaran yang dilaksanakan di sekolah tentunya sudah disesuaikan secara terstruktur berdasarkan tujuan kurikulum yang ada. Melalui proses pengajaranlah seluruh potensi seperti: kejujuran, sopan santu, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang ada pada diri anak akan terbentuk dan terbina dengan baik di sekolah. Penanaman tata tertib pada siswa sebagai mana generasi muda memang sangatlah penting. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang juga sebagai sarana pendidikan nilai moral dan norma bagi siswa, tentunya mempunyai hukum atau aturan yang dapat membatasi setiap perilaku siswa. Tata tertib merupakan hukum atau aturan yang dapat diterapkan di sekolah menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998:37), "peraturan atau tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan". Keberadaan tata tertib sekolah berfungsi sebagai pedoman berperilaku bagi siswa selama mereka bersekolah. Dalam lingkungan sekolah tata tertib di perlukan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang tertib, tenteram, kondusif dan penuh dengan kedisiplinan. Kedisiplinan selalu menjadi hal yang banyak dibicarakan oleh banyak orang, baik itu disiplin dalam keluarga, masyarakat maupun sekolah. Terutama sekali disiplin yang ada dalam suatu sekolah, karena di sekolah jelas sekali ada peraturan yang dimuat untuk mendisiplinkan anak didik di sekolah. Hal ini tentu saja tidak lepas dari seorang anak didik dan pendidikannya, terutama para pendidik, sebab disiplin sangat mempengaruhi keberhasilan seorang guru dalam mendidik, dengan mendidik dapat menjadikan seorang anak lebih bertanggung jawab atas segala tindakannya yang menyimpang dan dapat membuat anak didik lebih menghargai waktu dengan baik, Sehingga keberhasilan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

Keberagaman latar belakang dan potensi yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan siswa dalam mematuhi tata tertib, oleh karena itu tidak mengherankan jika ada siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri

dengan aturan yang ada menyebabkan siswa tersebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan siswa di sekolah cukup beragam, diantaranya keseimbangan,

membolos, keluar kelas pada waktu jam pelajaran, tidak suka memakai atribut sekolah, tidak mengikuti upacara bendera serta masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pembinaan terhadap tata tertib siswa ini dilakukan terutama bagi siswa yang sering melakukan pelanggaran. Dalam hal ini guru dan seluruh personel sekolah lainnya harus mampu menjadi pembimbing sebagaimana pendapat Mulyasa (2005:37), bahwa: Guru harus memenuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konseksten, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, kedisiplinan juga membutuhkan penopang agar bisa tetap survive, sesuatu yang bisa menjadikan kedisiplinan bisa dijalani dengan sebaik-baiknya oleh anak didik, yaitu yang disebut dengan alat kedisiplinan, salah satunya adalah hukuman, yaitu suatu alat yang menjadi alternatif terakhir setelah alat pendidikan lain tidak efektif digunakan. Secara umum hukuman ini ditunjukan untuk memperbaiki tingkah laku yang buruk menjadi baik, setelah anak menyadari dan menyesali perbuatan salah yang telah dilakukannya. Thomas Gordon mengatakan: "selain itu juga hukuman dapat mencegah timbulnya beberapa perilaku anak yang tidak dapat diterima atau mengacaukan".

Hukuman selalu mengandung rasa tidak enak pada anak, oleh karena itu di dalam memberikan hukuman pendidikan harus mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Hukuman pendidikan harus dengan sebaik mungkin menghindari hukuman fisik dan hukuman yang keras berdasarkan kekuasaan, sebab cara itu akan memupuk agresi dan kekerasan pula pada anak. Anak akan menjadi frustrasi dan reaksinya akan menimbulkan agresi dan rasa dendam, hukuman yang seharusnya menjadi alat kedisiplinan agar anak lebih teratur dan terarah menjadi tidak efektif lagi, sebab hukuman fisik ini mengandung rasa dendam.

Oleh karena itu dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri dalam berbagai tindakan dan perilakunya. Timbulnya kesadaran siswa akan kewajibannya untuk memenuhi tata tertib sekolah diharapkan tertanam pada perilaku atau moral siswa.

Sehingga siswa dapat berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, salah satunya adalah perilaku disiplin. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dan

pendidikan nilai yang mempunyai misi untuk menerapkan disiplin dengan tata tertib sekolah dalam memperlancar studinya di sekolah yang bersangkutan. Penerapan tata tertib sekolah yang disertai hukuman atau sanksi dibutuhkan sebagai usaha dalam membantu meningkatkan kedisiplinan siswa.

Hakikat hukuman dan sanksi diharapkan akan membuat siswa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan yang pada akhirnya dapat dirasakan pengaruhnya bagi siswa dalam membentuk kepribadian yang utuh atau kepribadian yang bermoral dan berdisiplin. Pada dasarnya setiap sekolah telah berusaha untuk merumuskan tata tertib yang diberlakukan bagi siswanya di SMPN 2 Kapuas timur Kabupaten kapuas. Salah satu sekolah di wilayah Kapuas Timur tersebut sudah berupaya untuk menerapkan tata tertib sekolah, namun sejak diberlakukannya tata tertib tersebut masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan berbagai pola pelanggaran yang berbeda-beda. Seperti membolos tidak memakai atribut sekolah dan sering keluar pada jam pelajaran berlangsung. Agar dapat mengetahui bagaimana efektivitas pemberian sanksi pada pelanggaran tata tertib di sekolah, maka penulis melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan mengambil judul: Efektivitas Pemberian Sanksi Hukuman Bagi Siswa Terhadap Pelanggaran Tata Tertib di SMPN 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

B. KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas pemberian sanksi yang dilaksanakan dilingkungan sekolah terhadap pelanggaran tata tertib tentunya tidak terlepas dari pengertian efektivitas itu sendiri, secara etimologis, efektifitas merupakan kata serapan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* menjadi efektif, lalu berubah menjadi efektifitas. Sedangkan menurut terminologi efektifitas berarti: "Dapat Membawa hasil". Sedangkan dalam kamus Ensiklopedia Indonesia, Efektifitas secara terminologi berarti, "menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan". Suatu usaha akan dapat dikatakan efektif kalau usahanya itu mencapai tujuan. demi tercapainya segala tujuan yang diharapkan. Sekolah itu sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan tempat belajar

dimana anak akan berusaha membina, Mengembangkan dan menyempurnakan segenap potensi yang ada pada diri anak menuju proses pendewasaan. Hal ini sejalan dengan pengertian

efektivitas menurut Hidayat (1986) bahwa suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Chester I. Barnard (prawirosentono, 1999:26), mengemukakan bahwa: Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Melihat pada bagaimana cara mencapai dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Efektivitas secara umum menunjukan pada taraf tercapainya suatu hasil, seiring atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dengan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut Georgopoulos dan Tannebaum (Tangkilisan 2004:34) "Effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfill its objective without placing strain upon its member", artinya efektivitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tentunya yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya. Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukan pada tingkat sejauh mana melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan

dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

C. METODE PENELITIAN

1. Alasan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti dapat menguraikan beberapa data yang diperoleh. Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif" (2010:6): Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, prinsip, motivasi tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pemilihan pendekatan dan metode sangat diperlukan dalam penelitian, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sebagaimana di kemukakan oleh Sugiono (2011:9) bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik, pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Menurut Arikunto (2006: 160) bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Mengenai metode penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu situasi, kondisi objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat. Tujuan metode deskriptif adalah memperlihatkan keberadaan suatu fenomena yang ada, misalnya dengan menggunakan sensus, sosial ekonomi penduduk, potensi pendidikan dan lainnya.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan guna memperoleh gambaran atau data yang berasal dari responden. Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, yang

berada di jalan Trans Kalimantan Anjir Serapat Km. 15 kode pos 73581 Kalimantan Tengah. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian ini adalah yang diberikan disekolah. Kurang disiplinnya para siswa mengakibatkan siswa yang sering melanggar mendapatkan sanksi atau hukuman.

3. Sumber Data

Penelitian ini, sumber data dipilih secara purposive yaitu guru dan siswa SMPN 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. Menurut Faisal (Wahyu, 2009: 69) dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan sumber data sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut : Data Primer dan data skunder

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri langsung melakukan penelitian dan berperan aktif menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsir data sehingga membuat kesimpulan atas semua temuan di lapangan.

Wahyu (2009:21) mengatakan Bahwa dalam Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan alat bantu yang digunakan dalam peneliti ini seperti pedoman wawancara, buku catatan dan kamera.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan tujuan dalam penelitian untuk mendapatkan data. Menurut Wahyu (2009:22) Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data itu sendiri. Diartikan sebagai suatu keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan dan pada umumnya dikatakan dengan waktu dan tempat, Observasi, wawancara.dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dalam melakukan penelitian dilapangan

dan setelah selesai melakukan penelitian dilapangan. Menurut Miles dan Huberman (Wahyu, 2006: 60) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data yaitu : reduksi data penyajian data, menarik Kesimpulan.

D. TEMUAN PENELITIAN

1. Bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa yang telah melanggar peraturan atau tata tertib sekolah?

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi dan pengamatan dapat diketahui melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan para guru lainnya selaku subyek penelitian didapatkan informasi bahwa dalam pelanggaran yang dilakukan siswa sangat beragam.

Hukuman merupakan salah satu alat pendidikan representatif yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dalam upaya menegakkan peraturan atau tata tertib sekolah.

Pertama : Siswa –siswi bila melanggar peraturan sekolah saksi apa saja yang diberikan: Menurut guru BP/BK sekaligus Guru Pkn juga dalam hasil wawancara peneliti yang bernama ibu Keristina, S.Pd. mengatakan, “Bagi siswa yang tidak mematuhi/melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan tindakan-tindakan berupa.” 1. Teguran lisan pertama, kedua, dan ketiga. 2. Melaksanakan Tugas sekolah 3. Peringatan tertulis 1, 2. Dan 3. 4. Skorsing. 5. Dikeluarkan dari sekolah.

2. Kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam penerapan pelanggaran sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah.

Hasil penelitian, Hukuman merupakan suatu alat pendidikan refrensif yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, dalam upaya menegakan peraturan atau tata tertib sekolah. Adapun tata tertib yang diberikan sekolah sering kali tidak di jalankan oleh para siswa dan seorang gurupun tidak bisa mengontrol siswa semua dalam hal ini yang sering dilakukan oleh siswa seperti pelanggaran meroko, membawa hp dan membawa sepeda motor kesekolah dll hal ini terlihat ketika peneliti melihat sendiri, adapun siswa yang membawa

motor seringkali tidak diparkir di lingkungan sekolah bahkan di parkir di rumah orang dan warung-warung yang dekat dengan sekolah.

Hukuman tindakan yang akhir diambil terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang sudah berkali-kali dilakukan setelah diberitahukan, ditegur, dan diperingati. hukuman mempunyai arti dan nilai sebagai akibat suatu pelanggaran dan hukuman juga titik tolak agar tidak terjadi pelanggaran. Hukuman sebagai alat pendidikan harus mampu menimbulkan keinsafan pada anak, sehingga ketika dia berbuat kesalahan maka akan bersedia untuk memperbaiki tingkah lakunya. Oleh karena itu Kartono (1992:262) berpendapat bahwa hukuman harus mempunyai nilai pedagogis yang terdiri dari 1. Apabila hukuman itu membantu anak untuk bisa bertanggung jawab dan mandiri secara susial, 2. Mampu mengenali kebaikan dan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hukuman harus mempunyai nilai pedagogis atau mendidik, dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat memberi motivasi pada siswa agar tidak melakukannya lagi dan dengan hukuman ini dapat membantu siswa lebih bertanggung jawab dan menjadi mandiri secara susila hingga akhirnya siswa tersebut melakukan perbuatan yang baik. Ketika memberikan hukuman harus disertai dengan penjelasan dan diakhiri pemberian maaf. Dengan demikian siswa tidak merasa direndahkan, tetapi mereka akan lebih mengerti dan menyadari akan kesalahan mereka. W.J.S Poerwadarminto (1976: 59) dalam “kamus umum bahasa indonesia” saksi berarti tanggungan (tindakan, Hukuman) yang dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau mentaati apa-apa yang sudah ditentukan. Sanksi atau hukuman adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang hal ini meliputi seperti guru pembimbing, atau orang tua terhadap siswa akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam lingkungan hidupnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk sanksi yang ditetapkan pada siswa yang melanggar tata tertib SMP N 2 Kapuas timur adalah sanksi fisik dan sanksi administratif. Sanksi fisik terdiri dari lari mengelilingi lapangan, membersihkan lingkungan sekolah dll. Sedangkan sanksi administratif terdiri dari peringatan, teguran, nasehat, dipanggil orang tua, di skorsing dan di kembalikan kepada orang tua (dikeluarkan).
- b. Kendala yang dihadapi sekolah dalam memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah yaitu jumlah siswa yang terlalu banyak sementara penanggung jawab keiswaan sedikit. Ketidak seimbangan tersebut membuat kesiswaan tidak dapat memperhatikan siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Pihak sekolah melakukan berbagai upaya untuk mengataasi kendala-kendala tersebut seperti melaksanakan teguran dan melakukan sosialisasi secara rutin. Teguranpun kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah biasanya dilakukan secara langsung pada saat siswa tersebut melakukan pelanggaran.

2. Saran

Penelitian ini ditunjukan kepada:

a. Siswa

- 1) Siswa diharapkan dapat memahami bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak terpuji.
 - 2) Siswa dapat memahami akan arti pentingnya peraturan tata tertib sekolah bagi dirinya sendiri dan bagi sekolah demi tercapainya tujuan sekolah.
 - 3) Peraturan tata tertib yang ada di sekolah agar selalu ditaati oleh semua siswa untuk tercapainya suasana yang kondusif.
- Guru, selaku pendidik di harapkan selalu sabar dalam menanamkan moral-moral kedisiplinan kepada

b. SMP N 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

- 1) Pihak sekolah hendanya lebih meningkatkan pemberian sanksi baik fisik maupun administratif yang mendidik bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah.
- 2) Kendala yang dihadapi sekolah dalam memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah yaitu terlalu banyak jumlah siswa sementara penanggung jawab kesiswaan sedikit sekali, sebaiknya pihak sekolah memperbanyak penanggung jawab kesiswaan sehingga siswa dapat terpantau.

c. Dinas pendidikan Kabupaten Kapuas

- 1) Dinas pendidikan penerapan sanksi terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah secara tidak lngsungmemberikan sanksi. Penerpan sanksi juga bertujuan untuk melatih siswa bertanggung jawabkan setiap perbuatanya.
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas penerpan sanksi diharapkan dapat memberi efek jera sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah yang pada akhirnya tercipta suasana sekolah yang kondusif.
- 3) Prodi Pkn FKIP Unlam Banjarmasin hendaknya sekolah dengan guru-guru terutama guru Pkn selalu memberikan contoh kepada siswa dalam melakukan kedisiplinan dan melakukan sosialisai kepda siswa yang dilakukan secara rutin setiap hari senin pada waktu pelaksanaan upacara bendera.
- 4) Peneliti lain, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya dan memberikan kedisiplinan kepada semua siswa.
- 5) Penulis, berharap sekecil dan sederhana apapun kajian ini dapat bermamfaat bagi para pemerhati dan praktisi pendidikan, khususnya pendidikan Pkn di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ag. Soejono. (1980). Pendahuluan pendidikan Umum. Bandung: CV. Ilmu.
- Anshari, Hafi (1983). Pengantar ilmu pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional
- Depdikbud. (1993). Wawasan Wiyata Mandala. Depdikbud
- Djahiri, Kosasih. (1985). Strategi Pengajaran efektif nilai moral VCT dan Gamesalam VCT. Bandung :Laboratorium Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan FPIPS IKIP.
- Hidayat (1986). Manajemen Sumber daya Manusia bagi Perusahaan: Yogyakarta: Gramidia.
- Indrakusuma Daien Amir. (1973). Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hurlock, Elizabet B. (1990). Perkembangan anak Jilid II. Jakarta Erlangga
- J.J. Hasibuan, dkk (1988). Proses Belajar Mengajar. Bandung; Remaja Karya.
- Kartono, Kartini. (1992). Psikologi Anak. Bandung: Mandar Maju.
- Komaruddin. (1994). Ensiklopedia Manajemen, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Bina Aksara. Jakarta.
- Kusmiati, mia (2004). Peranan tata tertib Asrama Dalam Menumbuhkan Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah. Skripsi pada FPIPS UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Mahsum. (2006). Metode Penelitian Bahasa. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Martoyo, Suliso. (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Nasution, S. (2003) Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). Kebijakan Kinerja Karyawan-Kiat membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta. BPFE.
- Poerwadarminta. WJS. (1976). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Ngalm. (1993). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung Ramaja Karya.
- Siangian P, Sondang. (2001). Audit Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekarto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali.
- Suwarno. (1981). Pengantar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Steers, M. Richard. (1985). Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Syafaat, A, Sahrani, S. An Muslih. (2008). Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwarno. (1992). Pengantar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. (2004). Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- Wahyu, 2009. Metode Penelitian Kualitatif (2). Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Wahyu, dkk, 2011. Pedoman penulisan karya ilmiah. Banjarmasin: Pustaka Banua.